

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejak runtuhnya orde baru, dan lahirnya era reformasi menimbulkan berbagai Gerakan sosial-keagamaan lahir. Ini karena adanya kehidupan demokratis di Indonesia sehingga Gerakan-gerakan baru muncul, baik yang bersifat nasional maupun transnasional. Gerakan nasional seperti MMI dan FPI dalam kategori Gerakan nasional. Sementara, Gerakan transnasional meliputi Hizbut tahrir, Jemaah Tabligh, dan Wahabi. Salah satu dari Gerakan transnasional ini yang sangat besar pengaruhnya adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir (HT) Partai Pembebasan adalah sebuah organisasi politik yang berdiri di atas akidah Islam. HT merupakan gerakan transnasional yang berjuang mendirikan kekhalifahan. HT menolak politik demokrasi dan negara bangsa karena dianggap tidak sesuai dengan kedaulatan Tuhan.¹Karena Islam telah merebut hati ratusan bangsa di seluruh tanah air, mulai dari China, Indonesia, India hingga Persia, Syria, Jazirah Arab, Mesir bahkan Maroko dan Spanyol. Karena Islam memiliki cita-citanya, mengendalikan moralitasnya, membentuk kehidupan mereka dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang memudahkan urusan hidup mereka serta masalah mereka.² Gerakan awalnya berkembang di Timur Tengah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia.

HT bertujuan untuk memulihkan kehidupan Islam dengan mempertahankan Khilafah dan melaksanakan dakwah Islam di seluruh pelosok dunia melalui dakwah Islam. Untuk mencapai tujuan ini, HT mengadopsi metode yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW.³ Dimana sistem Khilafah, yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melalui tindakan intelektual dan keagamaan, tanpa menggunakan kekerasan. Sebab sejak sepeninggal Rasulullah

¹ Martin Van Bruinessen, *Rakyat Kecil Islam Dan Politik* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013). Hlm. 350.

² Arief B.Iskandar, *Rekonstruksi Khilafah Dan Masadepan Cerah Peradaban Islam (Mengenang Keruntuhan Khilafah 3 Maret 1924)* (Yogyakarta: Follback dakwah, 2019). Hlm 12,

³ *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, ed. by M. Ramadhan Adi. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019). Hlm. 181

SAW Umat Islam melanjutkan perjuangan melawan agama dan peradaban kufur dalam bentuk pertempuran pikiran dan perjuangan fisik yang akan terus berlangsung – hingga Islam tersebar luas melintasi batas-batas negara, bahkan benua, hingga hanya beberapa daerah yang masih belum tersentuh peradaban Islam.⁴ HT memastikan bahwa menyampaikan pemahaman bahwa setiap perubahan sosial harus memiliki arah, tujuan dan metode tertentu; bahwa dalam perubahan sosial tentara sebagai *ahlul quwwah merupakan faktor penentu. Oleh karena itu*, seruan yang dilakukan selalu fokus pada dua hal tersebut. *Pertama*, ingatkan publik untuk memiliki tujuan yang jelas atas usulan perubahan yang mereka ajukan. Jangan hanya menuntut perubahan rezim, Anda harus mengubah sistem. *Kedua*, mengajak *Ahlul Quwwah* untuk mendukung bahkan memperkuat proses perubahan yang dituntut oleh umat.⁵ Oleh karena itu, harus ada kesadaran kolektif yang tumbuh dari masyarakat untuk kalangan ini. Para aktivis adalah kader dakwah yang terorganisir dengan baik yang dibina dalam pembinaan intensif ini.⁶ Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan sekaligus, yaitu:

1. Kebangkitan pikiran (ash-Shira 'al-Fikri).
2. Perjuangan politik (al-kifah as-siyasi).
3. Mengungkap rencana jahat orang-orang kafir (kasyf al-khuthath).
4. Penting juga untuk membela kepentingan umat (tabanni mashalih ummah).

Khilafah ini adalah merek dagang dari organisasi HTI. Dari pusat hingga daerah, para aktivis HTI punya suara untuk memperjuangkan khilafah. Khilafah adalah ide Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Isi gagasan khilafah adalah ukhuwah, syariah dan dakwah. Ukhuwah artinya persatuan seluruh umat Islam dunia.⁷ Penulis punya pengalaman tak terlupakan ketika data atau informasi tentang konsep khilafah ditemukan secara tertulis oleh anggota HT. Dalam setiap kesempatan, Hizbut Tahrir berbicara tentang urgensi untuk

⁴ *Benturan Peradaban Sebuah Keniscayaan*, ed. by Abu Faiz (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004).

⁵ Budi Mulyana, 'Peluang Khilafah Di Dunia Islam', *Al -Wa'ie*, May 2011.

⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, 'Metode Sahih Menegakkan Khilafah', *Al -Wa'ie*, July 2010.

⁷ Rio Aditya Nugraha, 'Mewaspada Monsterisasi Khilafah', *Al -Wa'ie*, March 2017.

menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya solusi efektif yang dapat mengatasi semua masalah akut yang dihadapi umat Islam seperti kemiskinan, kemunduran, kegagalan, kekalahan umat Islam dalam menghadapi hegemoni Barat dan menghadapi kanlemahn, tikake dan ya pendahidi kanlemahn berbicara tentang hal-hal sepele yang menimpa umat Islam, seperti jembatan runtuh, jalan rusak, daerah yang terkena banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya.⁸

Mereka menganggap khilafah solusi yang harus diimplementasikan ke dalam aspek kehidupan dapat menegakkan keamanan dan keselamatan dengan meregenerasinya dan mengubah sistem Islam dari teori menjadi praktik.⁹ Sehingga aturan Syariah yang diadopsi oleh sistem Khilafah adalah bersifat mengikat kepada orang-orang, seperti aturan transaksi, hukuman, dll. Jenis ini harus dipatuhi oleh warga karena dua alasan: Mereka adalah aturan Syariah, dan karena kewajiban untuk mematuhi otoritas yang sah (penguasa).¹⁰ Karena sistem Khilafah, kedaulatan adalah untuk hukum Allah (swt) yang objektif dan tidak dapat dimanipulasi untuk melayani kepentingan dari golongan tertentu. Hukum Syariah yang objektif menguntungkan umat manusia dan bukan elit politik dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.¹¹

Menurut HT, Khilafah adalah institusi politik terbaik bagi umat, dan satu-satunya pilihan politik bagi umat Islam di seluruh dunia tanpa tergantikan. Dalam buku *The Islamic Government System*, ditegaskan bahwa umat Islam dilarang mencari dan melaksanakan lembaga politik seperti republik, republik Islam, imperium, federasi, atau lembaga politik lainnya.¹² Karena Khilafah adalah kepemimpinan umum atas semua umat Islam, secara keseluruhan dunia, yang

⁸ Muhammad Idrus Ramli, *Hizbut Tahrir Dalam Sorotan* (Surabaya: Bina Aswaja, 2013). Hlm. 33

⁹ Abdullah İmamoğlu, 'Only Islam Can Provide the Peace and Security in Society', *Http://Www.Khilafah.Com*, 10 May 2019 <<http://www.khilafah.com/only-islam-can-provide-the-peace-and-security-in-society/>>.

¹⁰ Ata Abu Ar-rashtah, 'Q&A: The Islamic Ruling on Administrative Laws, Including Traffic Laws', *Http://Www.Khilafah.Com*, 14 June 2019 <<http://www.khilafah.com/qa-the-islamic-ruling-on-administrative-laws-including-traffic-laws/>>.

¹¹ Abdul Fattaah ibn Farooq, 'The Corruption of Lobbying in Democracy', *Http://Www.Khilafah.Com*, 29 February 2020 <<http://www.khilafah.com/the-corruption-of-lobbying-in-democracy/>>.

¹² Ainur Rofiq Al Amin, 'Konstruksi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir', *Jurnal Review Politik*, 07 (2017), 267–90. 268.

bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum-hukum Islam, dan untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia.¹³ Khilafah Islamiyah saat ini bukan hanya milik umat Islam Timur Tengah, tempat Khilafah telah berdiri selama berabad-abad. Karena dakwah yang lebih 'bebas hambatan', gagasan Khilafah kini telah merambah kawasan Asia, termasuk di Indonesia.¹⁴

HT mempunyai keyakinan hanya dengan institusi politik yang berdasarkan nilai dari Al-Quran dan Sunah kepada ummat Islam. Sehingga bisa meraih kejayaan pada masa-masa lampau.¹⁵ Sasaran sekundernya adalah negara-negara yang dianggap menindas umat Islam. Mereka mengklaim bahwa tidak ada perbedaan yang dapat dibuat antara politik dan Islam. Mereka menganggap Islam sebagai alternatif dari sosialisme dan kapitalisme. Karena kedua ideologi ini sekuler dan tidak sesuai dengan Islam. Secara keseluruhan, dari berdirinya HT hingga saat ini, tampaknya strategi utama HT untuk mendirikan Khilafah adalah untuk mendapatkan dukungan paling populer dengan mendirikan cabang di seluruh dunia.¹⁶ Mereka beranggapan bahwa Khilafah Islamiyah saat ini bukan hanya milik umat Islam Timur Tengah, tempat Khilafah telah berdiri selama berabad-abad. Karena dakwah lebih 'bebas hambatan', gagasan Khilafah kini telah merambah kawasan Asia, juga di Indonesia.¹⁷ Secara historis Khilafah telah membawa rahmat dan pengaruh besar bagi umat Islam di dunia, termasuk bagi negeri ini dan penduduknya. Selama 1300 tahun, Khilafah telah memberikan keadilan kepada warganya dengan menerapkan aturan tersebut.¹⁸ Ada lima ibu kota utama: Madinah, Kufah, Damaskus, Bagdad, dan Istanbul. Kepemimpinan Islam berubah dari satu tempat ke tempat lain dan dipegang oleh umat Islam dari berbagai asal ras

¹³ Hizbut Tahrir, *Al Khilafah* (London: Al-Khilafah Publications). Hlm. 5.

¹⁴ Hassan Ko Nakata, 'Sekarang, Dakwah Penegakan Khilafah Menyebar Di Asia', *Al -Wa'ie*, September 2007.

¹⁵ Syamsul Arifin, 'Gerakan Keagamaan Baru Dalam Indonesia Kontemporer: Tafsir Sosial Atas Hizbut Tahrir', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14.1 (2014), 117 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.80>>. hlm. 130.

¹⁶ Kathleen Jean Krause, 'Searching for the Next Al-Qaeda : Why and How Hizb-Ut-Tahrir Was Framed' (Ohio State University, 2008). Hlm. 19.

¹⁷ Musthafa Ali Murtadlo, 'Penegakan (Kembali) Kewajiban Khilafah', *Al -Wa'ie*, April 2016.

¹⁸ Muhammad Sadiq Amin, 'The Punishment System of Islam', *Http://Www.Khilafah.Com*, 14 February 2019 <<http://www.khilafah.com/the-punishment-system-of-islam/>> [accessed 31 July 2022].

sepanjang sejarah Islam.¹⁹ Landasan filosofi terkait dengan kerangka pemikiran yang pemikiran politik HT yang merujuk pada pendirian kembali khilafah. Landasan normatif terkait dengan dasar-dasar hukum (Islam) dari khilafah yang disarikan dari teks suci Al-Qur'an dan hadis. Sementara sejarah adalah praktik kekhilafahan dalam sejarah Islam yang menyokong era sejarah *Khilafah Islamiyyah*.²⁰ menegakkan kembali khilafah bukan sekadar proyek politik, melainkan solusi bagi semua masalah global, yang menyiratkan komitmen signifikan setiap Muslim untuk bekerja demi persatuan umat.²¹

Sebetulnya gerakan mendukung khilafah islamiyyah terjadi pada setiap periode. Sejak jatuhnya Ottoman, tidak ada lagi negara berlabel "khilafah". Maka setelah khilafah dihapuskan, hal itu dianggap oleh banyak umat Islam sebagai hal yang sangat mengagetkan dan merugikan umat Islam di seluruh dunia.²² Banyak negara yang menyebut dirinya negara Islam dibangun atas dasar kerajaan. Sampai saat ini, dunia Muslim dibagi menjadi kerajaan dan republik, dengan perbatasan yang ditentukan secara sewenang-wenang oleh kekuatan Barat.²³ Pada titik ini, bagi umat Islam, Khilafah Islam dipandang sebagai model terbaik dan satu-satunya bagi kemajuan umat Islam.²⁴ Khilafah yang diinginkan syariah adalah khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Islam telah menjelaskan tata cara pelaksanaan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban menegakkan khilafah.²⁵ Apalagi fakta sejarah menunjukkan: *Pertama*, kaum Muslimin, termasuk para Sahabat dan Tabi'in yang masih hidup, masih menyebut Muawiyah sebagai Khalifah, Amir al-

¹⁹ Tsuroyya Amal Yasna, 'From the Darkness of Dictatorships & Tyranny to the Light of the Islamic Khilafah Ruling System', *Http://Www.Khilafah.Com*, 16 May 2019 <<http://www.khilafah.com/from-the-darkness-of-dictatorships-tyranny-to-the-light-of-the-islamic-khilafah-ruling-system/>>.

²⁰ Syaiful Arif, 'Pandangan Dan Perjuangan Idiologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia', *Aspirasi*, 7.1 (2016), 93–104. Hlm. 97.

²¹ Elisa Orofino, 'Longing for the Calipate While Living in the State an Agent-Structure Analysis Of Appeal of Hizb Ut Tahrir to Muslims in The West' (University of Melbourne, 2018) <<https://doi.org/10.1080/21582041.2016.1236212>>. hlm. 149

²² Graham E. Fuller, *Understanding Contemporary Islamic Crises in the Middle East The Issues Bebeath the Surface* (Leiden: Leiden University Press, 2016) <<https://www.lup.nl/>>. Hlm. 14.

²³ Karen Armstrong, *Islam A Short History* (New York: Random House Publishing Group, 2002). Hlm. 159.

²⁴ Kemenag RI, *Radikalisme Agama Tantangan Kebangsaan*, ed. by Jaja Zarkasyi dan Thobib Al-Asyhar (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2014).

²⁵ Hizbut Tahrir Indonesia, 'Khilafah Ajaran Islam, Bukan Kejahatan', *Al-Islam*, August 2014.

Mu'minin. Begitu pula para khalifah setelahnya. *Kedua*, masing-masing menjadi khalifah setelah disumpah oleh kaum muslimin, bukan atas wasiat khalifah sebelumnya. Surat wasiat Putra Mahkota (*wilâyatu al-'ahdi*) yang diprakarsai oleh Muawiyah, merupakan salah satu cara untuk mencalonkan seorang calon Khalifah, meskipun pada akhirnya ini menjadi satu-satunya cara pencalonan dan seolah-olah mengikat umat Islam dengan calon yang diajukan Muawiyah. menginginkan khalifah sebelumnya. *Ketiga*, kedaulatan tetap di tangan Syariah, bukan Khalifah. Hukum yang berlaku masih Syariah. Sistemnya masih sistem Islam. Bahkan terdapat penyimpangan dan keburukan dalam pelaksanaan hukum (*isâ`atu fî at-tathbîq*), seperti mengangkat khalifah dengan sistem wasiat/putra mahkota yang mirip dengan sistem kerajaan. Namun kekhalifahan Anda tetap bukan kerajaan karena dalam sistem kerajaan kedaulatan ada di tangan raja dan hukum yang diterapkan adalah hukum yang ditetapkan atas kehendak raja.²⁶ Sayangnya bangsa Barat telah berhasil membuat kaum Muslim berada dalam suatu kondisi yang nyaris menjadi pihak yang terlumpuhkan. Bahkan umat gagal mengusir kekuasaan imperialis serta dominasinya meskipun mereka telah mengobarkan berbagai perlawanan dan peperangan untuk melawan kaum imperialis.²⁷

Sehingga mendirikan Khilafah adalah kewajiban bagi setiap Muslim di seluruh dunia, baik yang ditindas secara langsung oleh pemerintah yang tiran atau tidak. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.²⁸ Maka jika perbuatan itu wajib, maka pelaksanaannya adalah kewajiban, dan jika perbuatan itu lebih disukai, maka mengerjakannya lebih utama, dan jika perbuatan itu boleh, maka mengerjakannya boleh. Maka berikut ini adalah wajib sesuai dengan jenis perbuatannya, dan ini seperti mengikuti perintah Rasulullah saw.²⁹ Karena khilafah adalah aturan syari'at,

²⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, 'Apakah Khilafah Kedaluwarsa?', *Al-Islam*, May 2017.

²⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Suratul Badihah* (Bogor: Al Azhar Press, 2021). Hlm. 6

²⁸ Amanah Abed, 'Establishment of the Khilafah Is an Obligation upon Every Muslim Worldwide', *Http://Www.Khilafah.Com*, 29 August 2020 <<http://www.khilafah.com/establishment-of-the-khilafah-is-an-obligation-upon-every-muslim-worldwide/>>.

²⁹ Ata Abu Ar-rashtah, 'Q&A: Seeking the Nussrah from the People of Power', *Http://Www.Khilafah.Com*, 3 October 2019 <<http://www.khilafah.com/qa-seeking-the-nussrah-from-the-people-of-power/>>.

khususnya para ulama saat ini harus dapat berbicara dan harus berbicara tentang khilafah dengan metode Nabi.³⁰

Sesungguhnya masalah utama kaum Muslim adalah masalah mengubah negeri Islam menjadi Negara Islam dan menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya. Ini merupakan tujuan yang harus direalisasikan kaum Muslim. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menegakkan Khilafah.³¹ Karena dalam konteks restorasi Khilafah sebagai tariqah penegakan syariat Islam, HT memiliki landasan filosofis, normatif dan historis yang berbeda. Landasan filosofis tersebut terkait dengan kerangka pemikiran yang melandasi pemikiran politik HT yang mengacu pada restorasi Khilafah. Landasan normatif terkait dengan landasan hukum (Islam) khilafah, yang bersumber dari nash-nash suci Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan landasan sejarahnya adalah praktik khilafah dalam sejarah Islam, yang menggambarkan masa keemasan khilafah Islamiyah.³² Ketika Syariah diperkenalkan, kita harus bertanya: siapa polisi, siapa jaksa, siapa hakim, siapa pengacara, dan juga orang macam apa yang mengajukan gugatan terhadap Syariah. Syariat membutuhkan keteladanan, keikhlasan dan keikhlasan dalam perumusan dan pelaksanaannya.³³

HT didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem Timur oleh 'Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau menegaskan bahwa Islam hanya dapat dihidupkan kembali jika dikembalikan sebagai panduan komprehensif untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun ragu untuk menyebut sebagian besar orang Muslim sezamannya sebagai kufur (orang kafir), dia percaya bahwa hidup mereka didominasi oleh campuran pemikiran yang dipengaruhi oleh, Barat, sosialis, nasionalis, partisan, regional dan sektarian, membuat mereka terlepas dari Islam. Oleh karena itu, ia menolak semua bentuk pemerintahan alternatif sebagai buatan manusia dan tidak sempurna,

³⁰ Abdullah İmamoğlu, 'Khilafah Is from the Ahkam Shari'ah', *Http://Www.Khilafah.Com*, 16 August 2020 <<http://www.khilafah.com/khilafah-is-from-the-ahkam-shariah/>>.

³¹ Abdul Qadim Zalum, *Malapetaka Runtuhnya Khilafah* (Bogor: Al Azhar Press, 2020). Hlm. 230.

³² Syaiful Arif and Nuruzzaman, *Pancasila Vs Khilafah: Ancaman Hizbut Tahrir Terhadap Ideologi Negara* (Cirebon: Aksarasatu, 2019). Hlm. 76.

³³ Yusril Ihza Mahendra and DKK, *NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik Yang Manusiawi?* (Depok: Cerah Budaya Indonesia, 2019). Hlm. 54.

terutama demokrasi, yang dilihatnya sebagai sistem kekufuran.³⁴ HT adalah organisasi yang sangat berhati-hati dengan batasan hukum. Mereka tidak menggunakan kekerasan, meskipun terkadang mereka mendukung orang lain yang melakukannya. Tujuannya lebih revolusi daripada anti demokrasi, jadi salah satu cabang terbesar di dunia ada di Indonesia.³⁵

Di Indonesia, Hizbut tahrir mulai berkembang tahun 1980-an. Pada saat itu, HTI dikembangkan di Indonesia oleh Albdurahman Al-Baghdadi seorang ulama HT dari Australia. Ia bekerjasama dengan ulama asal Bogor yakni Abdurahman bin Nuh. Dari sini HTI mulai berkembang di Indonesia dan banyak memengaruhi kehidupan sosial-politik di tanah air. HTI sendiri merupakan ormas yang perkembangannya sangat signifikan di Indonesia. Terkait berapa jumlah anggota HTI memang masih simpang siur dan terkesan ditutup-tutupi. menurut ketua DPP HTI Rokhmat S Labib dalam sebuah wawancara pada 2017 enggan mengungkapkan berapa jumlah anggota HTI di Indonesia saat ini. Begitu juga saat Juru bicara HTI Ismail Yusanto saat ditanya Najwa Shihab pada 2018 lalu juga enggan menjawab berapa jumlah anggota HTI. Namun ada angka yang lebih jelas terkait anggota HTI, hal tersebut diungkapkan mantan ketua HTI Babel Ayik Heriansyah. Ia menyebut anggota HTI pada 2010 yang terdata ada 8.500 orang dan bertambah menjadi 20.000 orang di tahun 2018. Namun agaknya angka ini terlalu kecil mengingat pada 2013 dan 2015 HTI sukses mengadakan muktamar di GBK yang dihadiri lebih dari 100.000 orang simpatisan.³⁶ Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi terciptanya sistem demokrasi yang seimbang, karena gagasan yang diabdwa HTI jelas jauh dari sistem demokrasi dan pluralisme. HTI menginginkan sistem khilafah yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila.

Di Bogor, menjadi salah satu tempat potensial untuk melakukan gerakan yang dilakukan oleh HTI karena. *Pertama*, Bogor itu wilayah yang sentral, dekat dgn ibukota dan tepat dijadikan pusat Gerakan karena ada di wilayah tengah-tengah

³⁴ Zeyno Baran, *Hizb Ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency* (Washington: The Nixon Center, 2004). Hlm 16.

³⁵ Sidney Jones and others, *Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2015). Hlm. 17.

³⁶ Muhyiddin, 'Berapa Jumlah Anggota HTI? Ini Jawaban Ketuanya', <https://Nasional.Republika.Co.Id/> (Jakarta, 13 June 2017).

Indonesia (dekat ibukota). Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106o 48' BT dan 6o 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis. Penduduk Kota Bogor pada tahun 2016 berjumlah 1.064.687 jiwa yang terdiri dari 540.288 jiwa penduduk laki-laki dan 524.399 jiwa penduduk perempuan. Mayoritas penganut agama di Kota Bogor berjumlah 991.983 jiwa.³⁷

Kedua, Gerakan ini juga diawali di kampus di wilayah Bogor yakni IPB. Kader HTI di IPB diketahui pernah melaksanakan deklarasi khilafah pada tahun 2015 yang diikuti oleh 5000 Orang. *Ketiga*, Bogor juga menjadi salah satu penerbit buku yang digunakan oleh kader HTI seperti PTI. *Keempat*, Bogor juga pernah menjadi tuan rumah Mukhtar Mubandari Khilafah pertama di Sentul 2014 yang dihadiri oleh 15 ribu orang anggota dari dalam dan luar negeri (mancanegara). *Kelima* Dari segi politik pada pemilu 2019 masyarakat Bogor lebih memilih partai nasionalis dibandingkan partai islam. Berdasarkan berita acara rapat pleno penghitungan suara tingkat Kota Bogor terdiri dari 636.173 pemilih.³⁸ Menurut Komisi Pemilihan Umum(KPU) jumlah perolehan kursi partai pada pemilu DPRD Kota Bogor tahun 2019 terdiri dari Partai islam terdiri dari 5 partai dengan jumlah 22 Kursi sedangkan partai nasionalis terdiri dari 6 partai dengan jumlah 28 kursi..³⁹ Meski demikian PKS resmi menjadi partai pemenang. Berdasarkan rapat pleno terbuka KPU, PKS berhasil meraih kursi sebanyak 10 kursi. Disusul Gerindra 8 kursi dan PDIP 8 kursi.⁴⁰

³⁷Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 'Profil Kota Bogor', [Http://Perkotaan.Bpiw.Pu.Go.Id/](http://Perkotaan.Bpiw.Pu.Go.Id/) <<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/19>> [accessed 5 August 2022].

³⁸ Windiyati Retno Sumardiyani, 'Pileg 2019, PKS Kuasai Kursi DPRD Kota Bogor', [Https://www.pikiran-rakyat.com](https://www.pikiran-rakyat.com) (Bogor, 7 May 2019) <<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01311637/pileg-2019-pks-kuasai-kursi-dprd-kota-bogor>>.

³⁹ KPU, *Berita Acara Nomor 81/PL.01.9-BA/3271/KPU-Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019* (Indonesia, 2019).

⁴⁰ Yosep, 'Resmi Ditetapkan, Berikut Daftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2019-2024', [Https://www.Radarbogor.Id](https://www.radarbogor.id) (Bogor, 13 August 2019) <<https://www.radarbogor.id/2019/08/13/resmi-ditetapkan-berikut-daftar-50-anggota-dprd-kota-bogor-periode-2019-2024/>>.

Selain itu, Gerakan HTI di Bogor juga aktif terlibat dalam media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube*. Untuk menyampaikan setiap kesempatan untuk mempromosikan kekhalifahan sebagai sistem yang ideal.⁴¹ Mereka mengusahakan penyebaran wacana kekhilafahan Islam melalui publikasi-publikasi rutin mereka seperti buletin jum'at mereka yang bernama *Al-Islam* sering kali dapat kita temukan di banyak masjid-masjid kampus di Indonesia. Majalah *Al-Wa'ie* adalah majalah yang mereka terbitkan setiap bulan.⁴² Ini juga mencetak banyak terjemahan melalui rumah penerbitannya yang mendistribusikan buku-buku tentang sejarah kekhalifahan. Hadir di Internet, organisasi secara teratur memperbarui bagian berita dari situs webnya dan terbukti sangat aktif di Facebook dan media sosial lainnya Jaringan.⁴³

Namun, pada 8 Mei 2017, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa setelah mempertimbangkan dengan cermat, pemerintah akan memulai proses hukum untuk menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang dan menggabungkan organisasi penuh yang akan meradikalisasi gerakan. HTI adalah organisasi yang mempromosikan kekhalifahan Islam global yang bertentangan dengan ideologi nasional Indonesia Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor (Perppu) 2 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Sipil (CSO). Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melarang organisasi yang “mempromosikan ajaran ideologis atau filosofis yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan meminimalisir meningkatnya konflik agama, radikalisme dan ekstremisme.

⁴¹ Elisa Orofino, 'Researching "Intellectual Radicals" in the West', *SAGE Publications Ltd*, 2019. Hlm. 8.

⁴² Abu Mujahid, *Sejarah Salafi Indonesia* (Yogyakarta: Toobagus Publishing, 2012). Hlm. 142.

⁴³ Delphine Alles, *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy* (New York: Routledge, 2015) <<https://doi.org/10.4324/9781315764986>>. hlm. 90.

Kemenag juga konsisten dalam upaya menjaga moderasi di masyarakat.⁴⁴ Upaya pemerintah untuk mencegah bibit-bibit radikalisme mulai dari meningkatkan kerukunan antarumat beragama, fenomena kelompok pembohong (rojali) dan lain-lain, kami berharap ada bantuan dari Biro Kemenag Provinsi Jawa Barat dan Bogor agar situasi Kota Bogor Kota tetap stabil.⁴⁵ Pemerintah juga bekerja sama antara pemerintah daerah, polisi dan militer untuk mencegah propaganda ideologi radikal karena mereka terlibat langsung dalam melawan propaganda ideologi radikal. Kerja sama yang berlangsung dalam kerangka pemerintah, TNI dan Polri di tingkat kabupaten dilakukan dengan Kodim. Untuk menghindari propaganda ideologi radikal, menurut Diskominfo, pemerintah daerah mengacu pada kata-kata panglima tentang masyarakat yang perlu menjaga lingkungannya, baik di tingkat kecamatan maupun desa Babinsa, Babinmas. Tentunya dari tingkat dasar lingkungan dimulai dengan kesadaran masyarakat untuk mencegah propaganda ideologi radikal dengan mewaspadaai ancamannya. Sedangkan menurut Informasi Publik Polresta Bogor, pencegahan yang dilakukan oleh Intelijen dan Penerangan Masyarakat Polresta Bogor lebih menitikberatkan pada menginformasikan kepada masyarakat .⁴⁶

Selain itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Terorisme Nomor 3 Tahun 2004, fatwa yang muncul pasca Bom Bali 2002 dan peristiwa 11 September 2001, merupakan bentuk upaya MUI untuk merespon aksi-aksi saat itu. Larangan bunuh diri, teror dan makna jihad dan terorisme merupakan pokok-pokok fatwa. Fatwa perang bertujuan untuk mengetahui diksi 'jihad' yang dalam konteks agama memiliki makna etimologis yang luhur yaitu serius, ternyata kelompok teror telah membajak istilah jihad menjadi (qital).⁴⁷

⁴⁴ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, 'Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41.2 (2021), 134–47 <<https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>>. hlm 138.

⁴⁵ Pemkot Kota Bogor, 'Wawalkot Dan Kemenag Jabar Bahas Radikalisme Hingga Penanganan Covid-19', [https://Kotabogor.Go.Id/](https://kotabogor.go.id/), 2020 <https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/14414> [accessed 16 July 2022].

⁴⁶ Dewi Indri Rianti, M Affifudin, and Bambang Wahyudi, 'Kerjasama Pemda, Polres Dan Korem 061/SK Bogor Dalam Pencegahan Propaganda Ideologi Radikal Di Kabupaten Bogor', *Jurnal Prodi Perang Asimetris* /, 4.1 (2016), 45–76. Hlm. 55.

⁴⁷ Muhammad Syauqillah, 'Menggagas Pembaharuan Fatwa Terorisme', [https://Mui.or.Id](https://mui.or.id/), 2022 <<https://mui.or.id/berita/35372/menggagas-pembaharuan-fatwa-terorisme/>> [accessed 6 July 2022].

Selain itu, diperlukan kerja kolaboratif dan inklusif dari semua pihak. karena gerakan ekstrimisme, radikalisme dan tidak terkait dengan ajaran dan agama tertentu. Namun pada kenyataannya radikalisme memang semakin meningkat di berbagai kampus, terlepas dari kategori radikalisme diskursif, pemikiran radikal, mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku kekerasan.⁴⁸ Dengan demikian, siswa harus dibekali dengan pemahaman tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Disinilah peran guru agama yang harus mampu memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Bahwa Islam, yang benar-benar tidak pernah mengingkari orang lain, memusuhi pemerintah yang berdaulat dan melakukan jihad yang salah.⁴⁹ Sehingga bisa membentengi peserta didik dari ideologi radikal sekaligus membentuk karakter muslim yang benar. Karena Anak muda rentan terpapar radikalisme. Apalagi jika tidak memiliki pemahaman agama yang benar dan baik.⁵⁰

Polres Bogor gencar mengkampanyekan upaya deradikalisasi di Kota Bogor untuk menghilangkan pertumbuhan sel karena terbatasnya pemahaman mereka terhadap ajaran suatu agama. Polres Bogor melibatkan seluruh warga Kota Bogor dan instansi terkait secara terpadu, menolak segala bentuk radikalisme dan berpartisipasi aktif serta memerangi gejala tersebut, dalam hal apapun dengan aktif memperhatikan keadaan sekitar dan segera melaporkan jika ada apapun ada hal yang menarik.⁵¹

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Dialog Nasional bertajuk “Bhinneka Tunggal Ika Menyelamatkan Bangsa” di

⁴⁸ Nuraki Aziz, ‘Temuan BNPT Tentang Paparan Radikalisme Di Sejumlah Universitas Dipertanyakan’, *Https://Www.Bbc.Com*, 5 June 2018 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353>>.

⁴⁹ BNPT, ‘Cegah Anak Muda Di Kampus Terpapar Radikalisme-BNPT Dan Jatmi Akan Berikan Pemahaman Agama Yang Benar’, *Https://Www.Bnpt.Go.Id* <<https://www.bnpt.go.id/cegah-anak-muda-di-kampus-terpapar-radikalisme-bnpt-dan-jatmi-akan-berikan-pemahaman-agama-yang-benar>> [accessed 13 July 2022].

⁵⁰ Bahyu Supriyatna, ‘MUI Kabupaten Bogor Gelar Webminar Waspada Radikalisme’, *Https://Mediacyberbhayangkara.Com* (Bogor, 14 October 2021) <<https://mediacyberbhayangkara.com/mui-kabupaten-bogor-gelar-webinar-waspada-radikalisme/>> [accessed 13 July 2022].

⁵¹ Polresta Bogor Kota, ‘Kampanye Anti Radikalisme Melalui Billboard’, *Https://Bogorkota.Jabar.Polri.Go.Id*, 2016 <<https://bogorkota.jabar.polri.go.id/informasi-publik/kampanye-anti-radikalisme-melalui-billboard/>>.

Bogor, Jawa Barat. Bekerja sama dengan sejumlah tokoh lintas sektor, dialog ini menitikberatkan pada peran aktif tokoh agama dalam mengoptimalkan pencegahan kejahatan karena peran tokoh agama dalam mendidik generasi muda tentang Islam moderat.⁵²

Melalui pemahaman agama yang benar dan utuh, toleransi antar umat dan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan generasi muda terhindar dari ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.⁵³ Karena paham radikalisme berkembang dari ideologi kekerasan, menghalalkan segala cara kekerasan terutama orang yang tidak sejalan dengan mereka. sehingga propaganda radikalisme dilakukan oleh kelompok teror menggunakan berbagai macam metode dan media demi menarik simpati masyarakat. Sehingga tidak sedikit rumah ibadah digunakan sebagai corong menyuarakan propaganda.⁵⁴

Selain itu penguasaan media sosial sebagai media diseminasi untuk melakukan propaganda radikalisme dengan mengajak anak muda dengan narasi agama, seolah olah berjuang atas nama agama.⁵⁵ Sehingga butuh pengawasan dan screening terhadap akun dan narasi di media sosial yang harus dioptimalkan.⁵⁶

Selain itu banyak Mahasiswa yang masuk kategori terpapar radikalisme biasanya tidak cukup memahami ajaran agama. Tapi di sekolah atau di kampus, mereka berniat menekuni agama. Dalam kajian BIN 24% mahasiswa dan 23,3%

⁵²Gilang Akbar Prambadi, 'Cegah Radikalisme, BNPR Gandeng Pemuka Agama', *Https://Www.Republika.Co.Id/* (Bogor, 10 April 2021) <<https://www.republika.co.id/berita/qrchtu456/cegah-radikalisme-bnpt-gandeng-pemuka-agama>>.

⁵³BNPT, 'Jaga Wajah Islam Yang Moderat, Pondok Keagamaan Imani Siap Bersinergi Dengan BNPT', *Https://Www.Bnpt.Go.Id*, 2022 <<https://www.bnpt.go.id/jaga-wajah-islam-yang-moderat-pondok-keagamaan-imani-siap-bersinergi-dengan-bnpt>> [accessed 6 July 2022].

⁵⁴BNPT, 'Kepala BNPT Imbau Alim Ulama Sampaikan Narasi Keagamaan Dan Kebangsaan Bentengi Anak Muda Dari Radikalisme', *Https://Bnpt.Go.Id*, 2021 <<https://bnpt.go.id/kepala-bnpt-imbau-alim-ulama-sampaikan-narasi-keagamaan-dan-kebangsaan-bentengi-anak-muda-dari-radikalisme>> [accessed 6 July 2022].

⁵⁵ BNPT, 'Lwan Propaganda Radikalisme, BNPT Dan Mathla'ul Anwar Dorong Pemuka Agama Dakwah Bernada Kebangsaan', *Https://Www.Bnpt.Go.Id*, 2021 <<https://www.bnpt.go.id/lawan-propaganda-radikalisme-bnpt-dan-mathlaul-anwar-dorong-pemuka-agama-dakwah-bernada-kebangsaan>> [accessed 6 July 2022].

⁵⁶ Lucky Hakim, 'Deradikalisasi Yang Logis Dan Humanis', *Https://Www.Radarbogor.Id* (Bogor, 31 March 2021) <<https://www.radarbogor.id/2021/03/31/deradikalisasi-yang-logis-dan-humanis/>>.

pelajar menyatakan persetujuan mereka terhadap jihad dengan kekerasan.⁵⁷ Selain pelajar, gerakan ini juga menyusup ke dalam institusi sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan spiritualis. Di dalam organisasi itu, ideologi ekstremis berkembang. Beberapa guru adalah siswa yang sebelumnya bergabung dengan ekstremis/radikal. Mereka sengaja membiakkan adik-adiknya untuk dipersiapkan sebagai anggota Islam yang keras.⁵⁸

Namun hingga saat ini (skripsi ini diterbitkan). Gerakan HTI masih kuat di Bogor. Bahkan mereka masih membentuk sel-sel baru dan aktif terkait dengan kasus-kasus lokal dengan masalah global dan mengajak masyarakat untuk membangun tawaran sosial antara masyarakat dan pemerintah, kemudian menawarkan jalan Islam secara utuh.⁵⁹ Karena HT bersandar pada Islam di semua lapisan masyarakat sehingga mereka mengikat dan mengambil Mafahim (gagasan) dan sistem Islam. HT melihat mereka dari perspektif Islam, meskipun mereka terdiri dari suku dan denominasi yang berbeda. Sistem HT di luar Islam baik aspek budaya, politik, militer, ekonomi dan sebagainya, dari negara-negara muslim.

Fakta-fakta yang sudah disebutkan di atas jelas merupakan argumen penting kenapa penelitian HTI ini harus dilakukan. Apalagi, perkembangan HT di Indonesia diawali oleh Gerakan mahasiswa di kota Bogor. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena selama ini juga kajian tentang HTI banyak dilakukan dari sudut pandang politik karena HTI memang mengklaim diri sebagai organisasi partai politik karena dapat dengan jelas mengidentifikasi dirinya sebagai partai politik dengan namanya *hizb* jika menggunakan istilah partai politik secara luas. Munculnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 1, yang mendefinisikan partai politik di Indonesia sebagai organisasi politik yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia atas dasar kemauan dan cita-

⁵⁷ Abraham Utama, 'Badan Intelijen Menemukan 39% Mahasiswa Di Indonesia Radikal', Apa Tindak Lanjutnya?', *Https://Www.Bbc.Com*, 1 May 2018 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43949279>>.

⁵⁸ Kemenag RI, 'Pendapat Guru: Menangkal Radikalisme Di Sekolah', *Https://Pendis.Kemenag.Go.Id*, 2011 <<https://pendis.kemenag.go.id/read/pendapat-guru-menangkal-radikalisme-di-sekolah>> [accessed 13 July 2022].

⁵⁹ *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, ed. by Kyai Haji Abdurrahman Wahid (Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009). Hlm. 87

cita yang sama untuk bekerja demi kepentingan Anggota dan masyarakat berjuang berbangsa dan bernegara.⁶⁰

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk mengontrol kekuasaan politik dan merebut posisi.⁶¹ Namun berbanding dengan kenyataan karena HTI justru menolak sistem politik. Baginya sistem politik di Indonesia bukan sistem politik yang diinginkan. Karena sistem politik di Indonesia yang menggunakan demokrasi yang memiliki kebebasan berpendapat. Namun, mengingatkan segala sesuatu kebenaran merupakan kewajiban setiap insan selama hidup di dunia.⁶² Sedangkan hidayah untuk orang-orang yang keliru merupakan sepenuhnya kehendak Tuhan yang tidak dapat ditetapkan oleh manusia. Karena bertentangan dengan konsep Islam tentang kesatuan ummah (komunitas), teori negara Islam disajikan berdasarkan model transnasional “Khilafah”.⁶³ Sehingga perlu dilakukan penelitian mendalam tentang HTI untuk merumuskan solusi untuk mengatasi gerakan tersebut. Dan penelitian ini akan mengisi celah kosong tersebut. Sehingga kajian tentang HTI dan sejarahnya pertama kali masuk ke Indonesia khususnya di wilayah Bogor sangat penting karena menjadi mercusuar gerakan selanjutnya yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Makanya, penelitian mengambil tema HTI dengan judul Perkembangan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor dari Tahun 2010-2017.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan dakwah Hizbut Tahrir di Indonesia dan Bogor ?
2. Bagaimana strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor pada tahun 2011-2017 ?

⁶⁰ Akhiyat and Win Usuluddin, *Negara Utopia Eks Hizbut Tahrir Indonesia* (Surabaya: Imtiyaz, 2019). Hlm. 35.

⁶¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). Hlm. 400

⁶² Muhammad Azizul Ghofar, *Salah Kaprah Khilafah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hlm. 35.

⁶³ Noman Hanif, ‘Hizb Ut Tahrir: Islam’s Ideological Vanguard’, *British Journal of Middle Eastern Studies*, 39.2 (2012), 201–25 <<https://doi.org/10.1080/13530194.2012.711037>>. hlm. 206.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui perkembangan dakwah Hizbut Tahrir di Indonesia dan Bogor ?
2. Untuk mengetahui strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor pada tahun 2011-2017.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian tentang HTI masih banyak dilakukan dalam sudut pandang politik dan Gerakan. Misalnya oleh Claudia Nef (2012) penelitian ini berusaha untuk mengungkap sebuah gerakan Islam internasional yang berhasil menarik orang-orang terpelajar dengan memasang nilai-nilai kapitalis dengan nilai-nilai kaku. interpretasi tekstual Islam. Meskipun organisasi ini secara diskursif membingkai Islam sebagai alternatif neoliberalisme dan kapitalisme, anggota muda Muslimnya mengkonseptualisasikan agama sepanjang garis ekonomi sejauh nilai-nilai Islam dimobilisasi untuk pencapaian kesuksesan finansial, keunggulan akademik dan efisiensi dalam mempopulerkan visinya untuk dunia yang lebih baik.⁶⁴

Selain itu, Andi Saepudin (2015) Kajian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, menurut Taqiyuddin An-Nabhani, pembentukan partai politik yang ingin mencapai kebangkitan harus mengikuti metode Nabi Muhammad, yaitu melalui at-tatskif (pembinaan) at-Tafâ'ul ma al-Ummah (interaksi dengan masyarakat) dan thalab an-Nushra (meminta kekuasaan). Kedua pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tersebut berdampak pada Hizbut Tahrir Indonesia, terbukti dengan kesatuan pola pikir dan pola gerak sebagai penerapan konsep Syariah.⁶⁵

Kata Fitriana Hasanah (2016) HTI merupakan gerakan partai politik yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum di Indonesia karena menurut HTI dasar pelaksanaan dan tujuannya tidak sejalan dengan syariat Islam, yaitu dalam kerangka syariat Allah dan syarat-syarat calon dalam pemilukada. pemilihan anggota

⁶⁴ Claudia Nef, 'Living for the Caliphate : Hizbut Tahrir Student Activism in Indonesia' (University of Zurich, 2012) <www.zora.uzh.ch>. Hlm. 275.

⁶⁵ Andi Saepudin, 'Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Pembentukan Partai Politik Islam Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia' (UIN Syarif Hidayatullah, 2015). Hlm. 4

parlemen dan presiden UATI. Menurut HTI, khilafah tidak harus melalui pemilu. HTI mewujudkan Khilafah dengan cara yang digunakan Nabi Muhammad SAW.⁶⁶

Kemudian, didalam penelitian Yussukarno Wirayasa (2017) HTI adalah sebuah organisasi yang mewakili gerakan Islam global yang telah memproklamirkan dirinya sebagai organisasi politik Islam ideologis berdasarkan konsep Khilafah, sebuah konsep yang mengusung ideologi yang didasarkan pada gerakan dan ajaran Islam dan dakwahnya berdasarkan pendirian sebuah negara Islam. Khalifah. Selanjutnya, Hizbut Tahrir mengandalkan dan menganut ide dan gagasan revolusioner sebagai sarana utama untuk mengubah dunia dengan mempertimbangkan Islam sebagai ideologi.⁶⁷

Lebih jauh, Zakaria Al-Anshori (2010). Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki konsep ketatanegaraan sendiri, mereka mencoba mengonsepan sistem ketatanegaraan dan segala aspek yang berkaitan dengan kenegaraan dan kewarganegaraan, mulai dari hubungan internasional, politik dan ekonomi dalam Islam, sistem agraria, bentuk-bentuk milik (individu dan umum) dan semua Faktor yang menyebabkan berdirinya negara Islam (Daulah Khilafah).⁶⁸

Oleh karena itu, penelitian tentang sejarah HTI masih jarang dilakukan khususnya sejarah HTI ketika masuk ke Indonesia melalui kota Bogor, Jabar. Tujuannya ingin mengisi kekosongan literatur yg ada tentang kajian HTI di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman yg komprehensif tentang HTI kepada masyarakat luas khususnya kalangan akademisi.

E. Metode

a. Tahapan Heuristik

Berasal dari kata Yunani *heuristik*, yang mencari atau mengumpulkan sumber. Adapun mengenai tanggal tentunya maksud dari sumber berupa

⁶⁶ F Hasanah, 'Peranan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Non Partisan (Dalam Perspektif Khilafah)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2016) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40499/2/FITRINA_HASANAH-FISIP.pdf>. Hlm. 5

⁶⁷ Yussukarno Wirayasa, 'Strategi Pergerakan Hizbut Tahrir Dalam Menegakan Khilafah Di Indonesia Pada Periode Tahun 2000-2016' (UPN "Veteran", 2017). Hlm. 71.

⁶⁸ Zakaria Al-Anshori, 'Kampanye Konsep Kenegaraan Hizbut Tahrir Indonesia HTI' (UIN Syarif Hidayatullah, 2010). Hlm. 1

catatan, testimoni dan fakta-fakta lain yang menjadi gambaran dari sebuah acara. Materi yang digunakan sebagai sumber cerita sebagai alat, bukan tujuan. Dengan kata lain, orang harus mengetahui tanggalnya terlebih dahulu untuk menulis tanggalnya. Penelitian sumber adalah ilmu lain yang dikenal sebagai heuristik. Tidak mungkin membuat sejarah tanpa adanya sumber sejarah⁶⁹

1) Sumber primer

a) Buku karangan Anggota

- a) Abdullah, Muhammad Husain, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014)
- b) Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik Dan Spiritual* (Bogor: Al Azhar Press, 2010)
- c) Hafidz Abdurrahman, *Kebijakan Agung Khilafah Islamiyah Jilid I Penegakan Hukum, Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri Dan Militer* (Bogor: Al Azhar Press, 2017)
- d) Al-Ansari, Jalal, *Mengenal Sistem Islam Dari A Sampai Z* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- e) Al-Badri, Abdul Aziz, *Nasehat Ulama Untuk Penguasa* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2016)
- f) Al-Qashash, Ahmad, *Peradaban Islam VS Peradaban Asing* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014)
- g) Ali, Yasin Bin, *Negara Khilafah Dan Kaum Minoritas* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- h) Arief B. Iskandar, *Materi Dasar Islam Islam Mulai Akar Hingga Daunya* (Bogor: Al Azhar Press, 2015)
- i) Ath-Thayyibi, Achmad Junaidi, *Maqolah Ulama Ahlu Sunah Tentang Khilafah* (Bogor: Al Azhar Press, 2017)
- j) Belhaj, Syaikh Ali, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)

⁶⁹ M Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 219.

- k) Dodiman, M Ali, Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah Biografi Ringkas Tokoh Senior Huzbut Tahrir (Bogor: Al Azhar Press, 2012)
- l) Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir Dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014)
- m) Khan, Adnan, 100 Soal Jawab Seputar Negara Khilafah (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012)
- n) Saifullah, A, ed., Khilafah Dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- o) Salam, Zahid Ivan, Negara Khilafah Dan Politik Luar Negeri (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015)
- p) Shalih, Hafizh, Mengadili Demokrasi (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010)
- b) Acara Besar
 - a) Pawai bendera Islam 2010
 - b) Tanligh Akbar Tugu Kujang 2012
 - c) Konfrensi Islam dan Peradaban SICC Bogor 2014.
 - d) Indonesia Congress of Muslim Studens 2014
 - e) Acara remaja My Muve di Gor Pajajaran Bogor 2015
 - f) Mukhtamar Tokoh umat Btaja Mustika Bogor 2016.
 - g) Mukhtamar Panji Rasul 2017.

2) Sumber Sekunder

- a. Buku
 - a) Abdul Qadim Zalum, Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan Dan Menebarluaskan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2019)
 - b) Abdul Qadim Zalum, Funds in The Khilafah State (London: Al-Khilafah Publications, 1988)
 - c) Abdul Qadim Zalum, Malapetaka Runtuhnya Khilafah (Bogor: Al Azhar Press, 2020)

- d) Abdul Qadim Zalum, Sistem Pemerintahan Islam (Bogor: Al Azhar Press, 2019)
- e) Ata Abu Al-Rashtah The Manufacturing Policy and Building an Industrial State from the Viewpoint of Islam (Amman: Lecture Delivered at Abdul Hameed Shoman Foundation, 1990)
- f) Taqiyuddin An-Nabhani, At-Takattul Al-Hizbiy (Jakarta: HTI-Press, 2016)
- g) Taqiyuddin An-Nabhani, Daulah Islam (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2019)
- h) Taqiyuddin An-Nabhani, Dukhul Mujtama' Dan Nuqthah Inthilaq (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2022)
- i) Taqiyuddin An-Nabhani, Hakikat Berpikir (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003)
- j) Taqiyuddin An-Nabhani, Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (Jakarta: HTI-Press, 2005)
- k) Taqiyuddin An-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir (Jakarta: HTI-Press, 2001)
- l) Taqiyuddin An-Nabhani, Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW Membangun Daulah Islamiah Hingga Masa Keruntuhannya (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000)
- m) Taqiyuddin An-Nabhani, Nizham Al-Islam (Jakarta: HTI-Press, 2011)
- n) Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah, Dan Realitas Empirik (Bangil: Al Izzah, 1997)
- o) Taqiyuddin An-Nabhani, Syakhsiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003)
- p) Taqiyuddin An-Nabhani, Syakhsiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid II (Jakarta: HTI-Press, 2014)
- q) Taqiyuddin An-Nabhani, 'The Social System in Islam' (London: Al-Khilafah Publications, 1990)

- r) Hizbut Tahrir, A Warm Call from Hizb Ut-Tahrir to the Muslims (London: Al-Khilafah Publications, 1962)
 - s) Hizbut Tahrir, Al Khilafah (London: Al-Khilafah Publications)
 - t) Hizbut Tahrir, Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah (Jakarta: HTI-Press, 2004)
 - u) Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Adimistrasi) (Jakarta: HTI-Press, 2005)
 - v) Hizbut Tahrir, The Method to Re-Establish the Khilafah (London: Al-Khilafah Publications, 2000)
 - w) Hizbut Tahrir, The Ummah's Charter (London: Al-Khilafah Publications, 1989)
- b. Media cetak
- a) Buletin Al islam.
 - b) Media Ummat
 - c) Majalah Alwa'ie
- c. Media elektronik
- a) Web Hizbut Tahrir Indonesia <https://hizb-indonesia.online/>.
 - b) Web Hizbut Tahrir <https://www.hizb-ut-tahrir.info/>.
- d. Acara acara nasional seperti :
- a) Muktamar Khilafah 2013.
 - b) Konfrensi Islam dan Peradaban 2014.
 - c) Rapat Pawai Akbar 2015.
 - d) Muktamar Tokoh Umat 2016.
 - f) Aksi Damai 411 pada tahun 2016.
 - g) Aksi Damai 212 pada tahun 2016.
- e. Surat Peraturan Pusat No:
- a) SK Nomor : 44/D2.III.2/VI/2006
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
 - c) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017.
 - d) Surat Siaran Pers Kewenangan Legal Adimistratif Sebagai Tindak Lanjut Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

e) Putusan Nomor 39/PUU-XV/2017.

f) Surat Putusan Nomor 27 K/TUN/2019

b. Tahapan Kritik

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern.

1) Kritik interen

A. Buku karangan anggota

- a) Abdullah, Muhammad Husain, 2014 *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*.
- b) Hafidz Abdurrahman, 2010 *Diskursus Islam Politik Dan Spriritual*.
- c) Hafidz Abdurrahman, 2017 *Kebijakan Agung Khilafah Islamiyah Jilid I Penegakan Hukum, Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri Dan Militer*.
- d) Al-Ansari, Jalal, 2015 *Mengenal Sistem Islam Dari A Sampai Z*.
- e) Al-Badri, Abdul Aziz, 2016 *Nasehat Ulama Untuk Penguasa*.
- f) Al-Qashash, Ahmad, 2014 *Peradaban Islam VS Peradaban Asing*.
- g) Ali, Yasin Bin, 2015 *Negara Khilafah Dan Kaum Minoritas*
- h) Arief B.Iskandar, 2015 *Materi Dasar Islam Islam Mulai Akar Hingga Daunya*
- i) Ath-Thayyibi, Achmad Junaidi, 2017 *Maqolah Ulama Ahlu Sunah Tentang Khilafah*.
- j) Belhaj, Syaikh Ali, 2015 *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam*.
- k) Dodiman, M Ali, 2012 *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah Biografi Ringkas Tokoh Senior Huzbut Tahrir*.
- l) Hizbut Tahrir, 2014 *Mengenal Hizbut Tahrir Dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*.
- m) Khan, Adnan, 2012 *100 Soal Jawab Seputar Negara Khilafah*.
- n) Saifullah, A, ed.,2015 *Khilafah Dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara*.
- o) Salam, Zahid Ivan, 2015 *Negara Khilafah Dan Politik Luar Negeri*.

p) Shalih, Hafizh, 2010 *Mengadili Demokrasi*.

B. Acara besar

- a) Pawai Bendera Islam 2010
- b) Tabligh Akbar Tugu Kujang Bogor 2012
- c) Konfrensi Islam dan Peradaban di SICCC Sentul Bogor 2014
- d) Indonesia Congress of Muslim Studens 2014.
- e) Acara remaja My Muve di Gor Pajajaran Bogor 2015
- f) Mukhtamar Tokoh Umat di Braja Mustika Bogor 2016.
- g) Mukhtamar Panji Rasul Empang Bogor 2017.

2) Kritik eksteren.

A. Buku yang dikaji oleh anggota

- a) Taqiyuddin An-Nabhani, 2016 *At-Takattul Al-Hizbiy*
- b) Taqiyuddin An-Nabhani, 2019 *Daulah Islam*
- c) Taqiyuddin An-Nabhani, 2022 *Dukhul Mujtama' Dan Nuqthah Inthilaq*
- d) Taqiyuddin An-Nabhani, 2003 *Hakikat Berpikir*
- e) Taqiyuddin An-Nabhani, 2005 *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*
- f) Taqiyuddin An-Nabhani, 2001 *Mafahim Hizbut Tahrir*
- g) Taqiyuddin An-Nabhani, 2000 *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW Membangun Daulah Islamiah Hingga Masa Keruntuhannya*
- h) Taqiyuddin An-Nabhani, 2011 *Nizham Al-Islam*
- i) Taqiyuddin An-Nabhani, 1997 *Sistem Pemerintahan Islam Doktrin, Sejarah, Dan Realitas Empirik*
- j) Taqiyuddin An-Nabhani, 2003 *Syakhsiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid I*
- k) Taqiyuddin An-Nabhani, 2014 *Syakhsiyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid II*
- l) Taqiyuddin An-Nabhani, 1990 *'The Social System in Islam'*

B. Media yang digunakan

- a) Buletin Al islam.
 - b) Media Ummat.
 - c) Majalah Alwa'ie.
- C. Acara nasional.
- a. Muktamar Khilafah pada tahun 2013.
 - b. Rapat dan pawai akbar pada tahun 2015.
 - c. Aksi Damai 411 pada tahun 2016.
 - d. Aksi Damai 212 pada tahun 2016.

c. Tahapan Interpretasi

Interpretasi atau tafsir atau sering disebut sebagai subjektivitas. Itu sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa sejarah para sejarawan, data tidak bisa berbicara. Seorang sejarawan yang jujur akan membuat tanggal dan deskripsi dari mana tanggal itu berasal. Orang lain dapat melihat ke belakang dan memverifikasi. Oleh karena itu, subjektivitas historiografi diakui tetapi dihindari. Ada dua jenis interpretasi, yaitu analisis dan sintesis.⁷⁰

Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Di dalam buku buku dan media yang digunakan oleh anggota organisasi HTI di kota Bogor dari Tahun 2010 sampai dengan 2017 berisi tentang kejayaan kejayaan islam pada masa kekhalifahan pada masa lampau, bagian-bagian dari kekhalifahan, dan buruknya sistem demokrasi.

Sintesis berarti menyatukan. Setelah ada data buku buku dan media. juga pendapat dari tokoh tokoh yang merupakan anggota dari HTI melalui dari media serta acara-acara besar bisa temukan fakta bahwa organisasi tersebut sangat merindukan kejayaan islam seperti pada masa kekhalifahan dan ketidakpuasan sistem demokrasi.

Dakwah adalah panggilan atau ajakan kesadaran atau perubahan keadaan menuju keadaan yang lebih baik dan sempurna menurut ajaran Islam, baik bagi

⁷⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1995). Hlm. 78.

individu maupun bagi masyarakat.⁷¹ Pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu: *Dakwah Qouliyah (lisan)* yaitu dakwah dalam bentuk ucapan atau lisan yang dapat didengar melalui objek dakwah. Dakwah Kitabiyah (tulisan), suatu metode penulisan dakwah. *Metode Kitabiyah (bil qalam)* ini dapat disebarakan melalui media massa, buku atau buku agama, foto, lukisan dan sebagainya. *Dakwah Fi'liyah (Dakwah bil Hal)*, suatu metode penyampaian dakwah dengan tidak menggunakan kata-kata lisan atau tulisan, tetapi dalam bentuk tindakan nyata. Dakwah Fi'liyah ini bisa dalam bentuk uswatun hasanah, bakti sosial, dan sebagainya.⁷² Selain itu, pendidik juga dapat menggunakan metode yang dianggap lebih sesuai dan sesuai dengan tujuan pelatih, antara lain metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode ini banyak digunakan oleh para pendidik.⁷³

d. Tahapan Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah setelah melalui tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta dari berbagai sumber, dipilih dalam bentuk tulisan sejarah. Setelah meneliti data yang ada, sejarawan harus mempertimbangkan struktur dan gaya penulisan. Sejarawan harus sadar dan mencoba membiarkan orang lain memahami alasan yang dikemukakan.⁷⁴ Pada tahap terakhir inilah penulisan sejarah dilakukan.

Pada Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, Tujuan, Kajian Pustaka dan metode penelitian.

Pada Bab II berisi Sejarah Berdirinya Berdirinya Hizbut Tahrir. Sejarah Masuk dan berkembangnya Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor dari tahun 2011-2017.

⁷¹ Shohib, 'Hakikat Dan Tujuan Dakwah Dalam Mewujudkan Kehidupan Yang Damai Dan Harmonis', *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, 12.32 (2018), 83–88 <<https://doi.org/10.38075/tp.v12i32.56>>. hlm. 83.

⁷² Mohammad Hasan, *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013). Hlm. 115.

⁷³ Kemenag RI, *Pedoman Penyuluhan Manajemen Dakwah* (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2010).

⁷⁴ Sulasman, *Teori Dan Metodologi Sejarah Teori, Metode, Contoh Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 147.

Bab III yang berisi tujuan penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Bogor pada tahun 2011-2017. Strategi penyebaran dakwah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Bogor pada tahun 2011-2017.

